

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Teknologi merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi, baik dalam dunia pendidikan, media sosial maupun dalam dunia bisnis. Teknologi informasi digunakan bukan hanya sebagai pendukung tetapi juga sebagai kebutuhan utama yang dapat digunakan untuk menyediakan informasi dengan cepat. Teknologi informasi telah banyak digunakan untuk mendukung proses bisnis yang terjadi pada usaha keluarga, perusahaan, instansi dan lain-lainnya. Salah satunya Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penerapan teknologi informasi penerima bantuan pangan non tunai.

Dinas sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah dibidang sosial dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan serta tugas pembantuan, dalam menjalankan tugasnya Dinas Sosial menjalankan fungsi pelaksanaan, usaha penyantunan, pembinaan, dalam rangka meningkatkan kemandirian serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Baturangka, 2019).

Bantuan Pangan Non Tunai merupakan bantuan pangan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin yang ada di Indonesia. Bantuan tersebut bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan memberikan asupan nutrisi yang lebih baik kepada masyarakat miskin. Bantuan sosial non tunai diberikan dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari

perlindungan, jaminan, pemberdayaan, dan rehabilitasi sosial, serta pelayanan dasar (Resmi, 2021).

Pihak Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota masih mengambil keputusan dengan cara manual atau memeriksa dokumen pengusul bantuan dan mencocokkan dengan kriteria yang ada satu persatu tanpa menggunakan sebuah sistem yang akurat, Cara ini sangat memakan waktu dan hal ini mengakibatkan kesalahan sehingga bantuan menjadi kurang tepat sasaran dan dianggap tidak optimal.

Sistem pendukung keputusan merupakan sekumpulan prosedur sistem berbasis model guna membantu dalam mengambil keputusan pemberi bantuan pada calon penerima. Proses SPK terdiri dari beberapa alternatif dan beberapa kriteria yang diolah untuk memecahkan masalah dan dapat meningkatkan keakuratan keputusan yang diambil, Dalam mencari dan menentukan keputusan berdasarkan metode (Jadiaman Parhusip, 2019).

Analytic Hierarchy Process(AHP) merupakan suatu metode pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L, Saaty seorang ahli matematika pada tahun 1970, metode ini dikembangkan dengan tujuan utama untuk memecahkan suatu situasi kedalam beberapa komponen dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas, Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam penelitian ini penulis mengangkat sebuah topik yang bertujuan untuk merancang sebuah aplikasi sistem penunjang keputusan dengan judul :

**“IMPLEMENTASI METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) PADA SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMA BANTUAN PANGAN NON TUNAI BERBASIS WEB”.**

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis dapat merumuskan beberapa masalah diantaranya :

1. Bagaimana sistem pendukung keputusan dapat membantu dalam menentukan penerima bantuan pangan non tunai ?
2. Bagaimana sistem pendukung keputusan dengan metode *Analitical Hierarchy Process* (AHP) dapat menghasilkan keputusan yang tepat ?
3. Bagaimana merancang sistem pendukung keputusan dengan Metode *Analitical Hierarchy Process* (AHP) menentukan penerima bantuan pangan non tunai ?
4. Bagaimana mengimplementasikan sistem pendukung keputusan Metode *Analitical Hierarchy Process* (AHP) untuk menentukan penerima bantuan pangan non tunai ?

## 1.3 Hipotesa

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat diambil beberapa hipotesa, yaitu :

1. Diharapkan dengan adanya sistem penunjang keputusan dapat membantu dalam menentukan penerima bantuan pangan non tunai.
2. Diharapkan dengan adanya sistem penunjang keputusan dengan menerapkan metode *Analitical Hierarchy Process* (AHP) dapat menghasilkan keputusan yang tepat.
3. Diharapkan sistem pendukung keputusan metode *Analitical Hierarchy Process* (AHP) menentukan penerima bantuan pangan non tunai dapat dirancang.

4. Diharapkan sistem pendukung keputusan dengan menerapkan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dapat dibangun untuk menentukan penerima bantuan pangan non tunai.

#### **1.4 Batasan Masalah**

Untuk menghindari terjadinya pengembangan masalah yang lebih luas dan penulisan penelitian ini lebih terarah maka penulis menetapkan batasan-batasan terhadap masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana sistem pendukung keputusan dengan menerapkan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dapat menghasilkan keputusan yang tepat ?
2. Kategori apa saja yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penerima bantuan pangan non tunai ?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Membangun sistem pendukung keputusan yang dapat menghasilkan keputusan yang tepat dan akurat.
2. Menerapkan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dalam pembuatan sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Database mysql yang mampu untuk membantu pengambilan keputusan dalam penentuan penerima bantuan pangan non tunai.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

### 1. Mahasiswa

Untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Tugas Akhir di UPI “YPTK” Padang, agar menjadi sarana dan media bagi mahasiswa dalam penerapan dan pengembangan wawasan di bidang ilmu pengetahuan komputer serta menambah wawasan dan pengalaman dalam mengukur kualitas sistem

### 2. Kampus

Sebagai bahan untuk menambah referensi di Perpustakaan Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang khususnya program studi Sistem Informasi dan juga Sebagai alat ukur untuk menilai pemahaman mahasiswa dalam penelitian.

### 3. Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

Membantu para staff Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pengambilan keputusan penentuan penerima bantuan pangan non tunai dan Membantu meringankan kinerja para staff agar lebih efisien dan tepat waktu.

## **1.7 Sejarah Dinas Sosial**

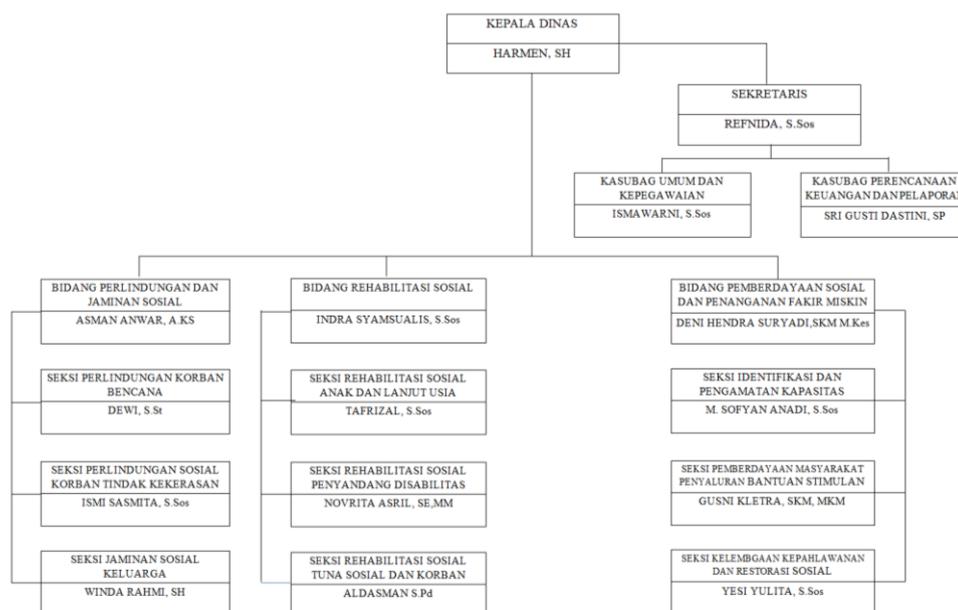
Sejarah Berdasarkan keputusan panitia persiapan kemerdekaan Republik Indonesia, tertanggal 19 Agustus 1945, Departemen Sosial RI merupakan salah satu departemen pemerintahan pada jaman itu. Menurut surat keputusan tersebut, tugas Departemen Sosial RI dinyatakan secara singkat dan sederhana, yaitu : “Urusan fakir miskin dan anak terlantar”. Untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, Pemerintah memikul tanggung jawab konstitusional, mengenai pembangunan kesejahteraan sosial, termaktub dalam pasal 34 UUD“ 45 bahwa :

“Fakir miskin dan anak - anak terlantar dipelihara oleh Negara”, yang berarti bahwa secara konstitusional, berdasarkan pasal 34 yang dirangkaikan dengan pasal 33 tentang perekonomian. Pemerintah membangun kesejahteraan sosial untuk meniadakan kemiskinan dan keterlantaran, yang terutama disebabkan oleh penjajahan, yang menindas dan menghisap Bangsa Indonesia yang nyata-nyata tidak berusaha untuk membangun kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia, malah membiarkan rakyat Indonesia cukup hidup dengan segobang atau dua setengah sen sehari.

### 1.7.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan sistem yang mendefinisikan hierarki dalam suatu organisasi ini mendefinisikan setiap pekerjaan, fungsinya dan kemana ia melaporkan ke dalam organisasi, kemudian dikembangkan untuk menetapkan bagaimana organisasi beroperasi untuk melaksanakan tujuannya.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dapat disajikan pada Gambar 1.1.



**Gambar 1. 1 Struktur Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota**

### **1.7.2 Aktivitas pada bagian kepegawaian**

#### **a) Bidang perlindungan, jaminan sosial**

1. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perlindungan sosial, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin.
2. Pemberian perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial
3. Pengelolaan dan manajemen logistik bencana.
4. Pelayanan publik terhadap penerima program jaminan sosial.
5. Pemberian bantuan terhadap fakir miskin.
6. Penyelenggaraan program penanganan fakir miskin perkotaan.
7. Penghimpunan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS serta data pendukung lainnya.
8. Pembinaan kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat.
9. Pembinaan peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial.
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **b) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial**

1. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial.
2. Menyelenggarakan program/kegiatan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan dan PMKS.
3. Memberikan dan pelayanan bantuan dan dukungan hukum kepada PMKS yang sedang menghadapi proses hukum dan pelanggaran hak-haknya.
4. Memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban bencana alam dan bencana sosial.

5. Melaksanakan koordinasi dengan pihak – pihak terkait penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial termasuk pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
6. Memberikan rekomendasi izin dan pengawasan terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan baik berupa uang, barang dan undian.
7. Menyelenggarakan usaha jaminan sosial terhadap individu, keluarga dan masyarakat.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

c) Seksi Penanganan Fakir Miskin

1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang penanganan fakir miskin.
2. Melakukan pemetaan kemiskinan perkotaan.
3. Melakukan identifikasi kebutuhan dan perencanaan penanganan kemiskinan bagi fakir miskin.
4. Memberikan pelayanan dan bimbingan sosial kepada fakir miskin/ keluarga kurang mampu dan wanita rawan sosial ekonomi.
5. Melaksanakan pengawasan program penanganan fakir miskin
6. Melaksanakan kegiatan vokasional dan peningkatan pengetahuan terhadap fakir miskin.
7. Penyediaan akses permodalan dan pengembangan usaha terhadap fakir miskin.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.